

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT
GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH
ANAK**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0139/PDT.G/2015/ PTA.MDN)

SKRIPSI

**OLEH:
HAPIZAH ALAWIYAH
NIM. 0201161024**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M/ 1442 H

**PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ
AKIBAT GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK
ASUH ANAK**

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0139/PDT.G/2015/ PTA.MDN)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

**OLEH:
HAPIZAH ALAWIYAH
NIM. 0201161024**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2020 M/ 1442 H

PERSETUJUAN
PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT
GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH
ANAK
(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0139/PDT.G/2015/ PTA.MDN)

Oleh:

HAPIZAH ALAWIYAH
NIM : 02.01.16.1.024

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Heri Firmansyah S.HI, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Mengetahui:
Kajur Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fak. Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SU

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 0139/ PDT.G/ 2015/PTA.MDN)**” telah dimunaqasyahkan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SU pada tanggal 05 November 2020 dan telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 05 November 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fak. Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SU

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200612 1 004

Anggota-anggota

Dr. Fauziah Lubis, SH, M.Hum
NIP. 19710528 200801 2 013

Heri Firmansyah S.HI, MA
NIP. 1983129 200801 1 005

Ibnu Radwan Siddiq T, M.Ag
NIP. 19740910 20003 1 001

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200612 1 004

Mengetahui
Dekan Fak. Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri SU

Dr. Zulham SH.I, M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hapizah Alawiyah

NIM : 02.01.16.1.024

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Peralihan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayiz Akibat Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn) adalah benar/asli Karya Sendiri. Kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan Terima Kasih.

Medan, 21 September 2020
Yang membuat Pernyataan

Hapizah Alawiyah
02.01.16.1.024

IKHTISAR

Banyak masalah hukum yang timbul yang berkaitan dengan hadhanah (pemelihara anak), terutama masalah hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz setelah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa setelah terjadinya perceraian, seorang anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya, dan ada kalanya seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaannya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak, dan selanjutnya digantikan oleh orang-orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, setelah perceraian mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, setelah ibu pemeliharaan anak selanjutnya diserahkan kepada ibunya ibu, dan setelah itu baru kepada ayah. Namun siapakah yang lebih berhak menggantikan ibu dalam pemeliharaan anak tersebut juga dapat menimbulkan perselisihan. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Disebut sebagai penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan dan bahan-bahan hukum yang tertulis. Yang mana bahan hukum primer yang terdiri dari: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G//2015/PTA.Mdn, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal yang berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam putusan No. 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn mengenai perkara hak asuh anak yang belum mumayyiz menetapkan ayah dari kedua anak yang belum mumayyiz sebagai pemegang hak asuh anak tersebut yang mana pada awalnya majelis hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusan No. 1072/Pdt.G/PA.Mdn menetapkan anak pertama dari penggugat dan tergugat diserahkan kepada ibunya ibu atau nenek dari pihak ibu, dan anak kedua diserahkan kepada ayah. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memberi putusan bahwa kedua anak yang belum mumayyiz tersebut diasuh oleh ayahnya dikarenakan hakim lebih mengutamakan kepentingan si anak atau melihat dari segi maslahatnya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT sebagai pencipta Alam Semesta, yang telah memberikan segala nikmat kepada manusia dan alam sehingga dikehidupan kita ini merasakan berkah yang tiada batas. Semoga iman kita terus bertambah layaknya nikmat yang kita rasakan sehingga taqwa melekat pada diri kita sendiri. Khususnya penulis mengucapkan syukur yang terdalam karena dapat diberikan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat berangkaikan salam kita junjungkan kepada Rasulullah SAW. suri teladan umat manusia sepanjang masa, karena perjuangan beliau kita dapat menikmati zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, berkat beliau jugalah kita dapat merasakan kehidupan yang islami seperti saat ini.

Melaui beberapa fase yang dilakukan dan semangat juang yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn)”**.

Proses yang dilakukan penulis memanglah tidak mudah dalam menempuh pendidikan ini, banyak rintangan yang penulis jumpai namun yakin dibalik kesusahan pasti ada kemudahan. Maka dari itu penulis

mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang terdekat yang telah memberi motivasi, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan studi di UIN Sumatera Utara ini, kepada:

1. Ayahanda Alm. Sahnun Rangkuti sosok yang saat ini tidak memberi namun yang menjadi panutan bagi penulis dan Ibunda Dra. Hj. Rosmanidar yang selalu memberikan nasehat, motivasi, dan yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada penulis. Dan juga kakakku Amaliyah Rahmah, SH, abang ipar M Nazrin Mtd, S.Pd dan adikku M Faiz Azmi yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
2. Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman M.Ag dan para staf ahli rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, Bunda Dra. Amal Hayati M.Hum atas kemudahan pelayanan selama studi.
4. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing Akademik, Bapak Irwan, M.Ag atas bimbingannya.
5. Dosen pembimbing Ibu Dr. Fauziah Lubis, S.H, M.Hum dan Bapak Heri Firmansyah S.HI MA atas bimbingan, kritik dan koreksinya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU.

7. Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Medan beserta jajaran staf yang telah mengizinkan penulis melakukan wawancara untuk pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Al Ahwal Al Syakhsiyyah A 2016 yang selama ini menempuh pendidikan bersama.
9. Untuk kawanku kawanku tercinta Susoy, Fitri Adilla Risa, Ardhina Shafa Spy, Ananda Tri Aswanti, Mufida Apriani, Faiz Ahmad Fauzi, Abdillah Prima Yudha, Tajuddin Lathif, yang selalu ada memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Untuk kawanku tercinta CE yang sedari MAN bersama dan memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Untuk yang tercinta Firabillah Ar-Rasyid Siregar, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semoga Allah SWT. tuhan yang maha tahu akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis. Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai hasil yang sebagaimana yang diharapkan, yaitu kesempurnaan baik dari segi isi, bahasa maupun dari segi analisa dan sistematika pembahasannya. Karenanya penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca demi perbaikan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca, dan semoga Allah meridhoinya. Aamiin.

Medan, 05 September 2020
Penulis

Hapizah Alawiyah
02.01.16.1.024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Landasan Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Pembahasan	22

BAB II : PANDANGAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK

(HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ

A. Pengertian Hadhanah.....	24
B. Dasar Hukum Hadhanah.....	26
C. Syarat-syarat Hadhanah	31
D. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak	33

**BAB III : HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ
APABILA SEORANG IBU GUGUR SEBAGAI
PEMEGANG HAK ASUH ANAK**

A. Hadhanah Setelah Perceraian	37
B. Penyebab Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak	41
C. Urutan yang Berhak Atas Hadhanah.....	46

**BAB IV : ANALISIS NOMOR 0139/PDT.G/2015/PTA.MDN
DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK**

A. Kasus Posisi.....	51
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn.....	52
C. Analisis Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn Dalam Perkara Hak Asuh Anak.....	55
1. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn Ditinjau Dari Segi Hukum Formil.....	55
2. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn Ditinjau Dari Ketentuan Perundang-Undangan.....	59
3. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA. Mdn Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan	61

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73
-----------------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita, kehidupan ummat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri tersebut. Sangat terkandung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan itu diperlukan adanya cinta lahir bathin antara pasangan suami isteri tersebut.²

Allah SWT menjelaskan dalam surat An Nisa' ayat 5 bahwa perkawinan itu merupakan sunnatullah yang harus dilaksanakan oleh ummat manusia. Dalam melaksanakan perkawinan itu kaum laki-laki boleh melaksanakan perkawinan dengan dua, tiga dan empat orang wanita

¹ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 1.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 1.

sekaligus. Jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka kaum laki-laki tersebut dianjurkan supaya kawin dengan seorang wanita saja. Adapun tujuan perkawinan itu adalah untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami isteri merupakan naluri insani dan secara fitrah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut.³

Berusaha untuk mengasuh anak termasuk sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama dan diutamakan, karena anak merupakan sambungan hidup dari orang tuanya. Cita-cita atau usaha-usaha yang tidak sanggup orang tuanya melaksanakan, diharapkan agar anaknya nanti yang melanjutkannya. Anak yang saleh merupakan amal orang tuanya. Hanya do'a anak yang shalehlah yang dapat meringankan orang tua yang telah meninggal dunia dari siksaan Allah sebagai yang dinyatakan Rasulullah s.a.w. dalam hadits beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah r.a. katanya, bahwa Rasulullah s.a.w. telah berkata: Apabila orang itu mati, putuslah amalnya; kecuali dari tiga perkara, yaitu: amal jariyah, atau ilmu yang memberi manfaat

³Ibid, h.76.

(yang diajarkannya) atau do'a kepadanya dari anak yang shaleh
(HR. Muslim)⁴

Dan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....(سورة
التحریم / ٦٦ : ٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....” (Q.S At-Tahrim/66:6)⁵

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga dalam ayat diatas ialah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim, yang berguna bagi agama. Ayat ini memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha agar mengasuh dan mendidik keluarganya.

Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Pasal 45

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁶

⁴A. Razak dan Rais Lathief, *Terejemahan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988), h.330.

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2012), h. 951.

⁶Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 9.

Namun ada kalanya perkawinan tersebut suatu saat bisa putus atau akan putus. Kendatipun menurut yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dari sudut tujuan perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya. Putus perkawinan artinya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sudah putus, tidak lagi berstatus sebagai suami isteri, melainkan menjadi duda dan janda, atau duda dan atau janda. Hak dan kewajiban antara keduanya berkaitan dengan perkawinan tidak ada lagi serta berakhir setelahnya. Kemudian, putusnya itu ada yang putus dengan sendirinya, namun ada pula yang di putuskan. Putusnya ikatan perkawinan, baik dengan sendiri maupun yang diputuskan, bisa disebabkan oleh salah satu dari tiga hal; a. Karena kematian, b.karena perceraian, c. karena atas putusan pengadilan (psl 38 UUP jo psl 113 KHI).⁷

Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang dibangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya. Akibat dari bubarnya perkawinan itu, tidak sedikit pula anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menanggung derita yang berkepanjangan. Terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut, timbul berbagai masalah hukum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, misalnya siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-

⁷Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2014), h.109.

anaknya, Majelis Hakim wajib memeriksa dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.⁸

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dikemukakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka akibat dari itu adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberikan keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁹

Dalam pemeliharaan anak, setelah terjadinya perceraian yang sering menjadi permasalahan adalah pemeliharaan anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz sangat memerlukan pemeliharaan dan didikan dari orangtuanya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seorang anak yang mumayyiz ketika ia sudah dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk (\pm umur 7 tahun)¹⁰.

⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h.77.

⁹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 9.

¹⁰Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Mustafa Ahmad al-Zaqra mengemukakan bahwa menurut ushul fiqh, mumayyiz adalah periode setelah masa al-thufu-lah (anak kecil yang belum membedakan antara yang bermanfaat dan mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa mumayyiz itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki. Meskipun masa akil-balig berbeda antara orang yang satu dengan yang lain, namun ulama fiqh mengemukakan batas minimal bagi anak perempuan adalah umur 9 tahun dan anak laki adalah umur 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum datang tanda akil-balig bagi mereka, maka umur 15 tahun itu dijadikan batas maksimal masa mumayyiz dan anak sudah dianggap aqil-balig.¹¹

Dalam kaitan ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menjelaskan secara lebih rinci dalam hal suami dan istri terjadi perceraian yaitu:

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayah.¹²

Pasal-pasal KHI tentang Hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI membagi tugas-tugas yang harus di emban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz

¹¹Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10,1 (Juni 2010): 122.

¹²Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h. 52.

tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.¹³

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 dijelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya hadhanah telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d)
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.¹⁴

Sepakat pula para ahli fiqh bahwa dalam hal terjadinya perceraian antara ibu dengan bapak si anak, maka ibu lebih baik melaksanakan pengasuhan daripada ayah. Pendapat ini didasarkan kepada: bahwa wanita itu lebih baik melaksanakan pengasuhan di banding laki-laki. Disamping itu

¹³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 303.

¹⁴Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h. 72.

wanita pada umumnya lebih sering di rumah, sedang laki-laki lebih banyak mempunyai pekerjaan diluar rumah. Sifat-sifat dan keadaan wanita itu sangat diperlukan bagi seseorang yang akan mengasuh anak dan mendidiknya. Karena itu Rasulullah s.a.w. menyatakan bahwa wanita lebih berhak mengasuh anak dari laki-laki sebagaimana tersebut dalam hadit:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي كَانَ بَطْنِي لَهُ
وِعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ، وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَارَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّه
الْحَاكِمُ.

Dari Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah,! Sesungguhnya anak saya (ini), perut saya mengandungnya dan tetek saya menyusunya, dan pangkuan saya tempat perlindungannya ; tetapi bapanya telah menceraikan saya dan hendak mengambil dia dari saya. Maka Rasulullah saw. bersabda : “engkau lebih berhak kepadanya selama belum berkahwin”. (Diriwayatkan -dia oleh Amad dan Abu Daud, dan disahkan –dia oleh Hakim).¹⁵

Menurut riwayat Imam Malik dalam Muwaththa, dari Yahya bin Sa’id, berkata Al Qasim bin Muhammad bahwa ‘Umar bin Khattab mempunyai seorang isteri dari golongan Anshar, dan dari perkawinannya telah lahir seorang anak, namanya Ashim bin Umar, kemudian ia bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba’ dan menemui anaknya itu sedang bermain-main didalam mesjid. ‘Umar mengambilnya dan meletakkannya diatas kuda. Dalam pada itu datanglah nenek si anak. Umar berkata “anakku”. Wanita

¹⁵Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam* (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h.516.

itupun berkata pula: “anakku”. Kemudian Abu Bakar memberi keputusan bahwa anak Umar itu ikut Ibunya.¹⁶

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. Adapun alasan pencabutan tersebut karena (1) orang tua sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya, (2) orang tua berkelakuan buruk sekali M. Yahya Harahap (1975 : 216) menjelaskan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi di sebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan mendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Akibat pencabutan kekuasaan dari orang tua sebagaimana tersebut diatas, maka terhentinya kekuasaan orang tua itu untuk melakukan penguasaan kepada anaknya.¹⁷

Banyak masalah hukum yang timbul yang berkaitan dengan hadhanah (pemelihara anak), terutama masalah hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz setelah perceraian. Dan ada kalanya seorang ibu gugur sebagai

¹⁶Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.140-141.

¹⁷Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 85.

pemegang hak asuh anak atau dicabut kekuasaanya dalam melakukan penguasaan atau pemeliharaan anak seperti yang telah di jelaskan di atas dan selanjutnya digantikan oleh orang-orang yang berhak atas pengasuhan anak tersebut. Namun siapakah yang lebih berhak menggantikan ibu dalam pemeliharaan anak tersebut juga dapat menimbulkan perselisihan. Sehingga masalah tersebut di bawa ke Pengadilan Agama, yaitu bagi mereka yang beragama Islam. Salah satunya ialah masalah hadhanah terhadap dua anak laki-laki yang belum mumayyiz, yang mana anak pertama berusia 10 tahun dan anak yang kedua berusia 9 tahun. Pada tanggal 15 Juli 2009 dalam Putusan Nomor 699/Pdt.G/2009/PA.Mdn pasangan suami istri tersebut telah resmi bercerai. Selanjutnya kedua anak tersebut tinggal bersama ibunya. Namun pada tanggal 17 Februari 2014 dalam Putusan Pidana Register Perkara Nomor: 2367/Pid.B/2013/PN.Mdn ibu dari anak anak tersebut divonis bersalah melakukan Tindak Pidana, sehingga ayah dari anak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan agar ia di tetapkan sebagai pemegang hadhanah atas kedua anaknya yang belum mumayyiz, sebagaimana kasus ini terkandung dalam perkara Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

Selanjutnya dalam kasus ini ibu dari anak-anak tersebut atau yang dalam putusan ini di sebut sebagai Tergugat/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar ia sedang menjalani hukuman pidana di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) Wanita Klas II A Medan, namun kedua anak tersebut di titipkan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi dan pihak keluarganya bersedia dan mampu membiayai nafkah dan mengasuh

kedua anak laki-laki tersebut. Dan pada saat ini kedua anak tersebut telah diambil oleh ayahnya yang dalam putusan ini disebut Penggugat/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan keterangan saksi menerangkan bahwa dulu ketika penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan bahwa anak pertama diasuh dan dipelihara oleh Tergugat Rekonvensi dan anak kedua diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Konvensi, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Penggugat Konvensi. Dan dalam persidangan tersebut anak pertama menyatakan ia lebih senang bersama neneknya dari pihak ibu (ibu dari ibu Tergugat Konvensi) daripada bersama ayah dan keluarga ayahnya.

Kemudian majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menetapkan pemegang hadhanah atas anak pertama Tergugat/ nenek dari pihak ibu, dan pemegang hadhanah atas anak kedua Penggugat / ayah. Selanjutnya atas putusan tersebut penggugat keberatan dan mengajukan banding dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut hukum, dan atas permohonan banding tersebut hakim tingkat banding menjatuhkan putusan dan membatalkan putusan hakim tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menetapkan pemegang hadhanah atas kedua anak tersebut Penggugat/ayah.

Maka atas kasus inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul : **PERALIHAN HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ AKIBAT GUGURNYA SEORANG IBU SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak di teliti adalah:

1. Bagaimana kronologi mengenai perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn ?
3. Bagaimana analisis Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologi mengenai perkara hak asuh anak dalam Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn.

3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dalam peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hadhanah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan mengenai hadhanah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Sumatera Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Sepanjang pengamatan penulis di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian tentang peralihan hak asuh anak yang belum mumayiz akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak (Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn).

Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, diantaranya yaitu:

1. Hak asuh anak (hadhanah) bagi ibu yang sudah menikah lagi menurut Al-Mawardi dan Ibnu Hazm (Tinjauan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Medan) oleh Yuni Tanjung (22144006)
2. Hak hadhanah orang tua yang muallaf terhadap anak menurut hukum keluarga di Malaysia (Studi kasus terhadap putusan Mahkamah Persekutuan Nomor 02(F)-5-01-2015 & 02(F)-6-01-2015) oleh Khairunnisa Binti Abd Samad (21135064)
3. Penetapan hak hadhanah akibat perceraian karena fasakh (Analisis putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 1/Pdt.G/2013/ PA. MUR) oleh Umami Halimah Lubis (21151001).

F. Landasan Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoretis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan

teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktek, maupun sebaliknya. Sehingga dengan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸ Jadi perlindungan hukum dapat dikatakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan dan kepastian hukum.

Menurut John Rawls mengenai teori keadilan ia berpendapat bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan apabila negara melaksanakan asas keadilan, berupa setiap orang hendaknya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan

¹⁸Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h.53.

kebebasan dasar (basic liberties); dan perbedaaan sosial dan ekonomi hendaknya distur sedemikian rupa sehingga memberi manfaat yang besar bagi mereka yang berkedudukan paling tidak beruntung, dan bertalian dengan jabatan serta kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.¹⁹Keadilan berarti tidak membedakan antara orang yang satu dengan orang yntag lainnya. Hakim sebagai penegak hukum diharapkan agar menerapkan nilai-nilai keadilan melalui putusan-putusannya, dan setiap rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan.

Tujuan hukum tidak hanya keadilan tetapi ada juga kepastian hukum. Menurut Fence M. Wantu, ia mengatakan hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.²⁰ Hukum harus tegas berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum di suatu negara yang mengandung kejelasan serta tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat dilaksanakan untuk menjamin hak dan kewajiban setiap negara.

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur kewenangan relative dan absolut Pengadilan Agama. Yang mana kewenangan relative

¹⁹Inge Dwisvimiar, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum* 11,1 (September 2011): 524.

²⁰R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia* 13,02 (Juni 2016): 194.

terdapat pada Pasal 54 yaitu kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayahnya. Kewenangan absolut terdapat pada Pasal 49 yaitu pengadilan agama berwenang mengadili suatu perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 dan 7 (1) mengemukakan hak dan kewajiban anak, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 7 (1), setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dalam Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya dan bapaklah berkewajiban membiayai pemeliharaan dan pendidikan si anak tersebut. Walaupun terjadi perceraian antara ibu dan bapak si anak, anak

tersebut masih berhak memperoleh pemeliharaan dan biaya untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya.

Sama halnya dengan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam Kompilasi Hukum Islam lebih eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak yang mana di jelaskan pada Pasal 105 bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun yang berhak untuk memeliharanya adalah ibunya. Dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz, maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih ayah atau ibunya dalam pemeliharanya. Namun masalah biaya pemeliharannya tetap di tanggung oleh si bapak.

Didalam Pasal 156 KHI menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Dan dalam pasal ini juga menjelaskan jika anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, namun jika ibunya meninggal maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis keturunan keatas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis keturunan keatas ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Di dalam hukum Islam apabila terjadi perceraian yang lebih berhak mengasuh atau memelihara anak adalah pihak wanita atau ibunya, karena ibu itu lebih dekat dengan anaknya, penyayang serta lebih halus dan lembut.

G. Metode Penelitian

Metode secara harfiah berarti “cara”, dalam pemakaian yang umum, metode diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang di pakai untuk mencapai tujuan tertentu.²¹

Untuk mendapatkan hasil kerja penelitian lebih efektif dan tepat sasaran, perlu kiranya ditentukan langkah-langkah yang akan di tempuh dan dikerjakan dalam melaksanakan penelitian ini, langkah langkah dimaksud adalah mulai dari penentuan jenis penelitiannya, penentuan sumber data, kemudian mengenai cara pengumpulan data serta teknik pengolahan data dan analisa data.

1. Jenis Penelitian

Penentuan dan penjelasan mengenai tipe dari penelitian yang akan dikerjakan ini dirasa penting terutama berkaitan dengan metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisa data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.²² Disebut sebagai penelitian normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan pada peraturan dan bahan-bahan hukum yang tertulis.²³

Apabila ditinjau dari segi teknik pengolahan dan analisa data yang akan diambil maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam teknik pengolahan dan analisa datanya tidak memakai

²¹M. Sobry Sutikno, *Belajar dan Pembelajaran* (Lombok: Holistica, 2013), h.83.

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), h.44.

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.13.

teknik statistik, melainkan penelusuran terhadap dasar pikir dan argumentasi pemakaian dan penggunaan peraturan perundang-undangan (normatif) dalam teknik yustisial peradilan.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian ini yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut ialah:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpress Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku yang mempunyai keterkaitan dengan Hukum Keluarga Islam khususnya yang berkenaan dengan masalah Hadhanah (hak asuh anak) dan jurnal yang berkenaan dengan masalah pemeliharaan anak.

3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi yang memakai metode penelitian hukum normatif, maka alat pengumpulan data yang dapat digunakan melalui studi dokumen.²⁴ Penelitian ini memang penelitian hukum normatif, maka pengumpulan datanya bagi keperluan penelitian ini menggunakan studi dokumen, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G/2015/ PTA.Mdn.

²⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pers, 1986), h.21.

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis isi (content analisis) dari bahan-bahan hukum primer seperti disebutkan diatas. Juga membaca dan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan rumusan masalah sehingga pada akhirnya hasil pembahasan penelitian ini diharapkan akan sampai pada perolehan suatu jawaban yang cukup memadai bagi pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah

Selain studi dokumen, digunakan juga interview/wawancara. Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan, dengan bercakap berhadapan muka dengan orang tersebut.²⁵ Dan yang menjadi sasaran untuk interview/wawancara ini ialah Hakim Pengadilan Agama Medan.

4. Metode Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka data tersebut dapat diolah dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. David D. Williams seorang peneliti yang banyak menggunakan pendekatan kualitatif mengatakan bahwa apabila penelitian yang dilakukan adalah terhadap sesuatu yang menghendaki deskripsi dan konklusi yang kaya tentang konteks,

²⁵Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT Gramedia, 1997), h.162.

maka pendekatan kualitatiflah yang lebih cocok dan dapat digunakan.²⁶

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka analisa datanya bergerak secara induktif. Untuk itu dalam menganalisis datanya dimulai dari membuat deskripsi atau gambaran fakta-fakta mengenai ketentuan-ketentuan peralihan hak asuh anak yang belum mumayyiz akibat gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang tertuan dalam peraturan-peraturan hukum yang ada.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu:

BAB I : Dalam bab pendahuluan, penulis akan mengemukakan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Landasan Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Membahas tentang pandangan umum tentang hak asuh anak (hadhanah) yang belum mumayyiz, yang isinya mencakup tentang pengertian hadhanah, dasar hukum hadhanah, syarat-syarat hadhanah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak.

BAB III : Membahas tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak, yang isinya

²⁶Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar dan Aplikasinya* (Malang:YA3, 1990), h.21-22.

mencakup hadhanah setelah perceraian, penyebab gugurnya seorang ibu sebagai pemegang hak asuh anak, urutan urutan yang berhak atas hadhanah.

BAB IV : Membahas tentang analisis Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn mengenai siapa yang lebih berhak atas hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila seorang ibu gugur sebagai pemegang hak asuh anak yang isinya mencakup, kasus posisi, dasar hukum pengadilan dan analisis.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, disamping itu penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYIZ

A. Pengertian Hadhanah

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *hadhanah*. Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari kata (حَضَنَ) *hadana*, artinya menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh dan memeluk, menetapkan sesuatu didepan ketiak dan pusar. Perkataan *al-hidn* berarti “rusuk”. Kemudian kata *hadhanah* digunakan sebagai istilah dengan arti “pengasuhan anak”, yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena seorang ibu yang mengasuh dan menggendong anaknya sering meletakkannya ditulang rusuk atau dalam pangkuan sebelah rusuknya. Seakan-akan pada saat itu ibu melindungi dan memelihara anaknya. Adapun secara terminologi *hadhanah* adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri.²⁷

Sa’di Abu Jaib pengarang Kitab *al-Qamusal-Fiqhiyah* mengatakan bahwa *hadhanah* adalah mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri untuk mengerjakan apa yang memberi kebaikan/manfaat untuknya, dan menjauhi apa-apa yang mengakibatkan bahaya bagi dirinya, walaupun ia adalah orang dewasa yang gila.²⁸

²⁷Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.77.

²⁸Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: CV Manhaji, 2016), h.210.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah (1994:133) *hadhanah* itu tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik yang menyangkut dengan perkawinan maupun sesuatu yang menyangkut hartanya. *Hadhanah* tersebut adalah semata-mata tentang perkara anak dalam arti mendidik dan mengasuhnya sehingga memerlukan seseorang wanita pengasuh untuk merawatnya sehingga ia dewasa.²⁹

Para ulama fikih mendefenisikan: *Hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab .³⁰

Hadhanah berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandungnya pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* dilaksanakan dan dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan profesional ; dilakukan setiap ibu, serta

²⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2003), h.78.

³⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.175-176.

anggota kerabat yang lain. *Hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.³¹

Dengan demikian *hadhanah* merupakan pemeliharaan terhadap anak yang belum bisa mandiri atau yang belum *mumayiz* dan yang masih memerlukan didikan, ampuan atau pengawasan serta kasih sayang dari orangtuanya agar tidak membahayakan jiwa maupun raganya.

B. Dasar Hukum Hadhanah

Anak adalah amanah Allah SWT. yang apabila tidak dipelihara akan mendatangkan fitnah, bahkan kesengsaraan yang berkepanjangan di akhirat. Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memelihara diri dari kesengsaraan tersebut.³²

Ayat al- Qur'an menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.....(سورة

التحریم / ٦٦ : ٦)

³¹*Ibid.*

³²Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 79

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....” (Q.S. At Tahrim / 66 :6)*³³

Ayat ini menjelaskan tentang orangtua diperintahkan oleh Allah SWT. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah dan larangan Allah, termasuk anak. Yang dimaksud memelihara keluarga dalam ayat tersebut adalah mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama. Ayat tersebut memerintahkan agar semua kaum muslimin berusaha mengasuh dan mendidik keluarganya.³⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة ٢:٢٣٣)

*... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...(Q.S. Al-Baqarah/2:233).*³⁵

Cakupan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak menurut nasihat Luqman Hakim dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah. Mensyukuri nikmat Allah berarti bersyukur untuk dirinya sendiri.

³³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Tanjung Mas Inti, 2012), h. 951.

³⁴Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 79-80.

³⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 57.

2. Agar tidak menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak. Hal ini karena derita ibu, terutama ketika ia sedang mengandung, bertambah-tambah hingga ketika menyapih, setelah dua tahun menyusuinya.
4. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, meskipun kedua orang tua memaksa berbuat syirik atau memerintahkan kemungkaran lainnya.
5. Agar senantiasa berbuat baik. Setiap perbuatan yang baik betapa pun kecilnya akan mendapat balasan pahala dari Allah.
6. Menaati perintah Allah, diantaranya dengan menegakkan shalat, mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi Munkar*), dan bersabar dalam menghadapi segala cobaan, karena semuanya itu adalah kewajiban manusia.
7. Agar tidak sombong dan angkuh, karena sifat dan sikap seperti ini tidak disukai Allah Swt.³⁶

Demikianlah beberapa pokok nasihat Luqman al-Hakim kepada putranya, yang mencakup pemeliharaan anak yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Kegagalan memelihara anak dalam membekali kebutuhan mereka, terutama bekal keagamaan, bukan saja merugikan diri si

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 192-195.

anak yang bersangkutan, namun kedua orang tuanya pun akan menderita kerugian yang tidak kecil. Karena kelak di akhirat mereka di tuntutan untuk mempertanggung jawabkannya. Yang jelas peranan orang tua akan sangat berpengaruh terhadap arah dan perkembangan keagamaan anak.³⁷

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak.

Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.³⁸

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam mengemukakan kewajiban lain orangtua terhadap anaknya.

Pasal 106

1. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jikakepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
2. Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalain dari kewajiban tersebut pada ayat (1).³⁹

³⁷*Ibid*,h.195.

³⁸Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 9-10.

³⁹Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h. 53

Dengan demikian, berdasarkan paparan Undang-undang dan KHI di atas menerangkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mengampu anak-anak mereka sebaik-baiknya hingga anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab orangtua sangatlah besar terhadap anak dalam hal pemeliharaan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 4 dan 7 (1) juga mengemukakan hak dan kewajiban anak.

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Dalam kedua pasal tersebut seorang anak berhak mendapatkan perlindungan, dan seorang anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan serta diasuh oleh orang tuanya sendiri.

C. Syarat-syarat Hadhanah

Untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya di perlukan beberapa syarat bagi yang melakukan hadhanah, sebagai berikut:

1. Yang melakukan hadhanah hendaklah sudah balig berakal, tidak terganggu ingatannya, sebab hadhanah itu merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab. Ahmad bin Hanbal menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular.
2. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik *mahdun* (anak yang di asuh), dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar.
3. Seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak.
4. Jika yang akan melakukan hadhanah itu ibu kandung dari anak yang akan di asuh, disyaratkan tidak kawin dengan lelaki lain. Dasarnya adalah penjelasan Rasulullah bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak hadhanah bagi anaknya selama ia belum menikah dengan lelaki lain (HR. Abu Daud). Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Oleh karena itu, seperti disimpulkan ahli-ahli fiqh, hak hadhanahnya tidak menjadi gugur jika ia menikah dengan kerabat dekat si anak, yang memperlihatkan kasih sayang dan tanggung jawabnya.

Demikian pula hak hadhanah tidak gugur jika ia menikah dengan lelaki lain yang rela menerima kenyataan. Hal itu terjadi pada diri Ummu Salamah, ketika ia menikah dengan Rasulullah, anaknya dengan suami pertama selanjutnya tetap dalam asuhannya (HR Ahmad). Berdasarkan kenyataan ini Ibnu Hazmin berpendapat tidak gugur hak hadhanah seorang ibu dengan menikahnya di dengan lelaki lain kecuali jika suami kedua itu jelas menolaknya.

5. Seorang yang melakukan hadhanah harus beragama Islam. Seorang nonmuslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh⁴⁰

Para ahli fiqh mendasarkan kesimpulan tersebut pada ayat 6 surah At-Tahrim yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud bilamana yang mendampingi atau yang mengasuhnya bukan seorang muslimin.⁴¹

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (*mahdhun*) itu adalah

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akal nya dan oleh karena tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang

⁴⁰Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 172-173.

⁴¹*Ibid*, h.173.

idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalinya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapapun.⁴²

D. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Peran Orangtua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal disekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan sang anak. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, ruhiyah, maupun 'aqliyahnya. Jasadiyah atau yang identik dengan kebutuhan lahiriyah, antara lain kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun bersifat sosial, seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesama. Adapun kebutuhan yang berhubungan dengan ruhiyah, seperti kebutuhan beragama, kebutuhan akidah, atau kebutuhan tauhid. Kebutuhan yang bersifat 'aqliyah, yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Adapun tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah:

1. Menanamkan sikap menebarkan manfaat bagi orang lain;
2. Memanggil nama dengan nama kesayangan;
3. Mengajari anak dengan kalimat-kalimat tauhid (kalimat-kalimat tayyibah);
4. Mengajari anak dengan amal-amal Islam;
5. Mengajari anak dengan akhlak mulia dan menjauhkan dari akhlak-akhlak tercela

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.329.

6. Mengajari cara menghargai dan menghormati orang tua, guru, teman, dan tetangga;
7. Membiasakan shalat dan membaca Al-Qur'an didepan anak;

Hadhanah adalah hak yang patut diterima anak karena memerlukan orang yang memelihara, membimbing, dan mendidiknya dengan baik.⁴³

Hak-hak anak adalah sebagai berikut:

1. Hak anak untuk hidup

Hak anak adalah diberi nama yang baik karena nama dapat menunjukkan identitas keluarga, bangsa, bahkan kaidah. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan nama anak yang menunjukkan identitas Islam. Selain itu, nama juga akan berpengaruh pada konsep diri sang anak.

2. Hak penyusuan dan pengasuhan

Untuk menjamin bahwa anak diberi makan, pakaian, dan dipelihara. Al Qur'an menetapkan ketentuan-ketentuan tentang rada'ah. Peraturan ini diajukan untuk melindungi kepentingan anak-anak, baik dalam keluarga yang utuh maupun keluarga tidak utuh. Islam pun telah menetapkan bahwa orang yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dan paling terampil (ahli) dalam pengasuhan.⁴⁴

3. Hak mendapatkan kasih sayang

⁴³Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 85-86.

⁴⁴Abd Al-Rahman, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam* (Jakarta: Aneka Cipta, 1996), h. 138.

Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita untuk menyayangi keluarga, termasuk kepada anak. Selain itu, Rasulullah SAW. juga mengajarkan untuk mengungkapkan kasih sayang tidak hanya secara verbal, tetapi juga dengan perbuatan. Dorothy Law Nolte berkata, “Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan.”

4. Hak mendapatkan perlindungan dan nafkah dalam keluarga

Sebagai pemimpin dalam keluarga, seorang ayah tentu bertanggung jawab atas keselamatan anggota keluarganya, termasuk anaknya ia akan melindungi anaknya dari hal-hal yang membahayakan anaknya, baik fisik maupun psikisnya. Demikian pula, ia berkewajiban memberi nafkah berupa pangan, sandang, dan tempat tinggal kepada anaknya.

5. Hak pendidikan dalam keluarga

Anak mendapatkan hak pendidikannya dikeluarga sebelum mendapatkan pendidikan di sekolah. Mendidik adalah tanggung jawab bersama antara ibu dan ayah sehingga diperlukan pasangan yang seakidah dalam pendidikan anak. Anak mendapatkan pendidikan berupa uswah hasanah dari kedua orang tuanya.

Apabila hak-hak anak seperti yang di sebutkan dipenuhi , anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berkualitas, menjadi anak

yang bertaqwa dan mampu mengelola kehidupan dunia dengan ilmu dan keterampilannya.⁴⁵

⁴⁵Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h.88-90.

BAB III

HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ APABILA SEORANG IBU GUGUR SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH ANAK

A. Hadhanah Setelah Perceraian

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orangtuanya, baik kedua orangtuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinan mereka gagal karena perceraian. Kalau suami istri bercerai hidup maka yang akan memelihara si anak atau yang akan menjadi wali si anak hendaklah di rembukkan dengan sebaik baiknya. Kalau perlu pengadilan dapat memberikan putusannya. Yang harus di jadikan dasar fikiran adalah, siapakah di antara keduanya yang pemeliharaannya akan paling menguntungkan bagi si anak.⁴⁶

Bila kedua orang tua si anak masih lengkap dan memenuhi syarat, maka yang paling berhak melakukan *hadhanah* atas anak adalah ibu. Alasannya adalah lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada dibawah tanggung jawab si ayah. Hal ini sudah serupakan pendapat yang di sepakati oleh ulama.⁴⁷

⁴⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986), h. 139

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), h.329.

Alasan yang dikemukakan di samping perasaan kasih sayang sebagaimana di atas juga dari sepotong hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud menurut yang di riwayatkan Ahmad, Abu daud, dan disahkan oleh Hakim

Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul Allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang mengandungnya, puting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya. Nabi SAW bersabda: “engkau lebih berhak untuk mengurusnya selama engkau belum kawin”.⁴⁸

UUP perkawinan sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang penguasaan anak bahkan di dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. Sehingga pada waktu pada tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab-kitab fikih. Barulah setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, masalah hadhanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama di beri wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁴⁹

Kendati demikian, secara global sebenarnya UUP telah memberi aturan pemeliharaan anak tersebut yang di rangkai dengan akibat putusnya perkawinan.⁵⁰

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

⁴⁸*Ibid*, h. 330.

⁴⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 298.

⁵⁰*Ibid*, h. 299.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dimaksud anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵¹

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anaknya. Masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak di tanggung oleh bapak si anak, namun bila si bapak anak tersebut tidak dapat memenuhi biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa si ibu dari anak tersebut ikut menanggung biaya tersebut.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang pemeliharaan anak ketika terjadinya perceraian.

Pasal 105

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.⁵²

Pasal tersebut cukup jelas mengatur tentang pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian. Dalam pasal tersebut ibu menjadi prioritas utama dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz. Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang baligh berakal. Pada masa ini seorang anak

⁵¹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 9

⁵²Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h.52.

secara sederhana telah mampu membedakan masa yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya. Oleh karena itu, ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut ibu atau ikut ayahnya.⁵³ Namun dalam pasal 105 KHI tersebut seorang anak yang belum berusia 12 tahun ia dikatakan belum mumayyiz, serta masalah pemeliharanya ialah hak ibunya dan biaya pemeliharannya di tanggung oleh ayahnya.

Para ahli fiqh pada umumnya membagi masa pengasuhan itu kepada dua masa , yaitu:

1. Masa anak kecil ialah masa sejak anak dilahirkan sampai anak berumur antara tujuh dan sembilan tahun terserah kepada pengasuh untuk menetapkan batas-batas umur itu. Pada masa ini anak belum bisa mengurus dirinya sendiri. Ia memerlukan pelayanan, penjagaan, dan didikan dari pengasuhnya. Pada masa ini kepada anak telah dapat secara berangsur-angsur ditanamkan kepercayaan dan kecintaan kepada Allah sesuai dengan kemampuannya sebagai anak-anak. Bahkan Agama menganjurkan agar mengiqamatkan anak yang baru lahir apabila ia perempuan dan mengazankannya apabila ia laki-laki. Diantara tujuannya ialah agar kalimat yang mula-mula didengar anak-anak yang baru lahir

⁵³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 182

itu adalah kalimat tauhid. Disamping itu mulai diajarkan tentang budi pekerti dengan mengemukakan contoh-contoh yang baik.⁵⁴

2. Masa kanak-kanak, masa ini mulai sejak anak berumur tujuh atau sembilan tahun dan berakhir pada waktu anak berumur sembilan atau sebelas tahun. Pada masa ini anak-anak telah mulai dapat mengurus dirinya sendiri, telah mulai mencari teman dan pada umumnya telah masak untuk bersekolah. Karena itu ia telah boleh memilih pengasuh yang ia sukai di antara pengasuhnya yang ada. Pada masa ini telah diajarkan latihan-latihan untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, seperti sembahyang, puasa dan sebagainya, sehingga apabila ia telah baligh, ia tidak canggung lagi dan telah terbiasa mengerjakannya.

Apabila masa pengasuhan di atas telah berlalu, maka orang tua anak hendaknya mempertimbangkan bentuk-bentuk pengasuhan lain yang perlukan oleh anak-anak dalam menhidupi kehidupannya dimasa yang akan datang.⁵⁵

B. Penyebab Gugurnya Seorang Ibu Sebagai Pemegang Hak Asuh Anak

Orang yang mengasuh anak disyaratkan mempunyai *kafa'ah* atau martabat yang sepadan dengan kedudukan anak dan mampu melaksanakan

⁵⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.146.

⁵⁵*Ibid*, h. 147.

tugas-tugas sebagai pengasuh anak. Adanya kemampuan dan *kafa'ah* mencakup beberapa syarat tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak ada, gugurlah hak-haknya untuk mengasuh anak. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Musafir* (tidak menetap)

Seorang ibu yang tempat tinggalnya tidak menetap tidak boleh mengasuh anak tetapi ia harus memberikan hak asuh kepada orang yang bisa mengasuh dan membimbingnya. Sebagaimana pendapat Malikiyah, seorang ibu boleh digantikan tanggung jawab mengasuh anaknya apabila ia *safar* (pergi karena agama) kira kira enam mil atau lebih. Menurut Hanafiyyah, hak asuh ibu boleh digantikan kepada orang yang berhak apabila ia *safar*, yang kejauhannya tidak memungkinkan menghantarkan anaknya dalam waktu setengah hari, kemudian pulang lagi kerumahnya. Adapun menurut syafi'iyah, hak hadhanah ibu bisa di gantikan apabila sang ibu bermaksud pindah dari suatu tempat ke tempat lain, baik dekat maupun jauh karena agama.

2. Memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan

Bagi seorang yang mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan atau penyakit menular, ia tidak dapat mengasuh anak, sebagaimana pendapat Malikiyyah dan Hanabilah

3. *Fasiq* (tidak dapat dipercaya)

Artinya, tidak menjalankan agama dengan baik, tidak meninggalkan dosa besar dan kecil. Orang yang agamanya rendah

tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

4. Kafir (bukan Islam)

Ini adalah pendapat yang dianut jumhur ulama karena tugas pengasuh itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang akan diasuh

5. Belum dewasa (belum balig)

Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas mengasuh anak. Oleh sebab itu, ia belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan.

6. Tidak sehat/ gila

Orang yang kurang akalnya tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.

7. Tidak mampu mendidik anak

Orang yang tidak mampu mendidik anak tidak berkewajiban mengasuh anak.

8. Budak (tidak merdeka)

Budak perempuan tidak berhak mengasuh anak walaupun tuannya mengizinkan.⁵⁶

Apabila ada suatu penghalang terhadap kemampuan pemeliharaan, maka pemeliharaan itu gugur dan pindah kepada orang yang mengiringi

⁵⁶Mahmuddin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 90-92.

perempuan yang seharusnya memelihara itu menurut tertibnya. Maka apabila penghalang tersebut telah hilang, misalnya karena perempuan tersebut telah di cerai atau sakitnya sudah sembuh, maka hal pemeliharaan itu kembali kepadanya. Ini menurut pendapat jumhur. Berbeda dengan pendapat Malikiyah yang mengatakan, bahwa pemeliharaan itu kalau sudah gugur tidak dapat kembali lagi.⁵⁷

Jika orang tua dalam melaksanakan kekuasaannya tidak cakap atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka kekuasaan orang tua dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama. M. Yahya Harahap (1975: 216) menjelaskan bahwa orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anaknya yaitu meliputi ketidak becusan si orang tua itu akan atau sama sekali tidak mungkin melaksanakannya sama sekali, boleh jadi disebabkan karena dijatuhi hukuman penjara yang memerlukan waktu lama, sakit uzur atau gila dan berpergian dalam suatu jangka waktu yang tidak diketahui kembalinya. Sedangkan berkelakuan buruk meliputi segala tingkah laku yang tidak senonoh sebagai seorang pengasuh dan pendidik yang seharusnya memberikan contoh yang baik.⁵⁸

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak.

Pasal 49

⁵⁷Mu'ammal Hamidy, *Perkawinan dan Persoalannya* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), h. 159

⁵⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material Dalam praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka bangsa Press, 2003), h.85.

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁹

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hal yang sama.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁶⁰

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI orang tua atau wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang apabila ia melalaikan atau berkelakuan buruk, dan pencabutan tersebut berdasarkan keputusan Pengadilan. Demi kepentingan si anak agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik maka perlu juga diperhatikan orang yang menjadi wali atau orang yang memelihara anak tersebut apakah ia dapat memelihara anak tersebut dengan baik.

⁵⁹Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 10.

⁶⁰Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, h.54.

C. Urutan yang Berhak Atas Hadhanah

Ketika berbicara perwalian dalam konsep Islam ada beberapa permasalahan yang sangat dekat yang harus juga ikut di jelaskan yakni permasalahan pemeliharaan anak (*hadhanah*).⁶¹ Melihat kepada mashlahahnya, para ulama fikih menjadikan dan mendahulukan hak hadhanah (hak asuh anak) pada kaum wanita, karena wanita itu kasih sayangnya lebih besar, lebih tekun serta telaten dan mendidiknya, dan lebih banyak bergaul dengan anak-anak.⁶²

Dalam masalah hadhanah bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan hadhanah. Di antara dasar kesimpulan ini adalah sabda Rasulullah yang maksudnya *“Barang siapa memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya di hari kiamat”* (H.R. Abu Daud). Alasan lain adalah bahwa ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa umur tersebut, dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Atas dasar itu, jika ibu berhalangan atau meninggal dunia, maka selanjutnya yang akan melakukan hadhanah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok kerabat perempuan garis lurus ke atas, yaitu (setelah ibu), nenek garis ibu dan seterusnya. Perlu di garis bawahi, bahwa menurut sebagian kalangan Hanafiyah bilamana kelompok pertama ini tidak ada atau berhalangan, maka hak hadhanah belum

⁶¹Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), h.53.

⁶²Vivi Kurniawati, *Pengasuhan Anak* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h.12.

berpindah kepada ayah kandungnya, tetapi berpindah kepada kelompok kerabat seperti urutan yang disebutkan kemudian. Berbeda dengan itu, menurut Imam Syafi'i bilamana kelompok yang pertama tersebut tadi tidak ada atau berhalangan, maka hak hadhanah langsung berpindah kepada ayah kandungnya. Artinya, kelompok-kelompok kerabat berikut ini berhak melakukan hadhanah bilamana ayah tidak ada atau berhalangan.

2. Nenek garis ayah.
3. Kerabat kelompok saudara perempuan kandung dari anak, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan seibu.
4. Bibi seibu, seterusnya bibi seapak.
5. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, seterusnya anak perempuan dari saudara seapak.
6. Bibi kandung sebelah ayah, selanjutnya yang seibu, dan kemudian yang seapak.
7. Bibi kandung dari ibu, kemudian bibi seapak, seterusnya bibi seibu. Setelah itu, bibi kandung, bibi seapak, dan seterusnya bibi seibu dan seapak.⁶³

Menurut Imam Syafi'i, oleh karena ayah telah menduduki urutan kedua dari kelompok-kelompok diatas, setelah kelompok ibu dan nenek,

⁶³Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 220-221.

maka setelah kelompok-kelompok di atas tidak ada atau berhalangan, hak hadhanah pindah kepada kerabat dekat laki-laki (setelah ayah) yaitu kakek garis ayah dan seterusnya seperti dalam urutan yang akan disebutkan kemudian. Sedangkan menurut sebagian Hanafiyah, setelah kelompok-kelompok di atas tidak ada/ berhalangan, hak hadhanah baru pindah kepada ayah, dan berikutnya kelompok-kelompok seperti urutan di bawah ini:

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek dari garis ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, kemudian yang seayah, dan seterusnya keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok kerabat paman kandung dari ayah (saudara laki-laki kandung dari kakek garis ayah), kemudian paman seapak, dan keturunan laki-laki mereka.⁶⁴

Dalam hal kelompok-kelompok di atas berhalangan, dalam madzhab Syafi'i terdapat dua fatwa. *Pertama*, fatwa yang menetapkan bahwa kelompok kerabat *zawil arham* seperti yang akan disebutkan, tidak berhak melakukan hadhanah, karena mereka terbilang sebagai kerabat jauh dalam kajian kewarisan. Menurut fatwa ini, tugas hadhanah berikutnya dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh hakim. Fatwa *kedua* menetapkan, bahwa bilamana kelompok-kelompok tersebut berhalangan,

⁶⁴*Ibid*, h. 221

maka tugas hadhanah dilakukan oleh kerabat-kerabat yang akan disebutkan kemudian. Alasannya, meskipun mereka tidak termasuk ahli waris yang mungkin mendapat harta warisan, namun mereka ini pada dasarnya akan lebih merasakan kasih sayang terhadap anak itu. Pendapat yang disebut terakhir ini, didukung oleh sekurangnya sebagian kalangan Hanabilah dan pendapat itu pula yang di anut oleh kalangan Hanafiyah. Setelah kelompok kerabat ini tidak ada, baru tugas hadhanah dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan fatwa ini, maka hak hadhanah selanjutnya dipegang oleh kerabat, antarlain kakek dari garis ibu, dan paman dari garis ibu, baik yang kandung maupun yang seapak dan seibu. Setelah kelompok ini tidak ada, seperti dikemukakan di atas hak hadhanah dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh hakim.⁶⁵

Sedangkan akibat suatu perceraian telah diatur di dalam pasal 156 KHI yang menyatakan bahwa "akibat putusnya perkawinankarena perceraian ialah : a)Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2. Ayah, 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5.Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b). Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, c). Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani

⁶⁵*Ibid*, h.222.

anak, meskipun biaya hadhanah telah diukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula, d). Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), e). Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d), f). Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶⁶

Dalam pasal 156 KHI khususnya pada bagian (a) menerangkan urutan yang menggantikan kedudukan ibu dalam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz.

⁶⁶Dahwadin dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), h. 154-155.

BAB IV
ANALISIS NOMOR 0139/ PDT.G/ 2015/ PTA. MDN DALAM
PERKARA HAK ASUH ANAK

A. Kasus Posisi

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 16 November 2015 mengenai hak asuh anak, maka penulis menguraikan kasus posisi terlebih dahulu yakni sebagai berikut:

Penggugat (ayah) dan Tergugat (ibu) awalnya adalah suami istri yang sah, akan tetapi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klas I A Medan Registrasi Perkara Nomor 699/Pdt.G/2009/PA. Mdn tanggal 15 Juli 2009 telah terjadi Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang belum mumayiz (masih dibawah umur), yang mana anak pertama berusia 10 (sepuluh tahun) dan anak yang kedua berusia 9 (sembilan tahun).

Pada mulanya kedua anak laki-laki dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Tergugat, akan tetapi setelah putusan perceraian tersebut Inkraht (Berkekuatan Hukum Tetap), Tergugat malah melakukan perbuatan tercela berdasarkan kutipan Putusan Pidana Register Perkara Nomor 2367/pid.B/2013/PN.Mdn yang dibacakan pada hari Senin, tertanggal 17 Februari 2014, Tergugat telah divonis bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat menerima

Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah) jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dikarenakan tergugat sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dapat mengasuh kedua anak mereka, penggugat atau ayah dari kedua anak tersebut melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dari kedua anak yang belum mumayyiz tersebut.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 0139/Pdt.G/ 2015/PTA.Mdn

Adapun Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat, dengan alasan bahwa Tergugat melakukan perbuatan tercela dan dinyatakan bersalah sehingga saat ini sedang menjalani hukuman pidana penjara selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Berdasarkan keterangan saksi I dan II yang diajukan Penggugat, kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, demikian pula menurut saksi III dan IV yang diajukan Penggugat, bahwa anak pertama bernama ANAK I dalam asuhan Penggugat sejak satu tahun yang lalu sampai

sekarang, dan anak yang kedua bernama ANAK II diasuh Penggugat sejak anak tersebut berumur 2 bulan, sedangkan berdasarkan saksi I, II dan III yang diajukan Tergugat, bahwa anak yang pertama diasuh Penggugat sejak bulan puasa 2 tahun yang lalu dan anak yang kedua diasuh oleh Penggugat sejak anak berumur 2 bulan sampai sekarang;

Sesuai bukti yang telah terbukti bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sedang menjalani hukuman pidana selama 6 tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.;

Sesuai Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan anak, sepanjang keduanya memenuhi syarat atau tidak melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena orangtua anak-anak (Penggugat dan Tergugat) telah bercerai, maka untuk menentukan hak hadhanah (pemeliharaan anak) kepentingan anak harus didahulukan, harus mengutamakan mana yang lebih baik untuk kepentingan anak, karena sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Sesuai pertimbangan tersebut di atas, dapat dipastikan bahwa sekurang-kurangnya sampai pada bulan Juli 2019 Tergugat masih harus

menjalani hukuman pidana penjara, sehingga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan termasuk merawat anak, lebih dari itu dengan telah adanya vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan tindak kejahatan, maka Tergugat dipandang tidak layak melakukan hak hadhanah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, meskipun ada kesediaan dari pihak keluarga Tergugat (ibunya Tergugat/nenek anak-anak), namun apabila masih ada ayah atau ibu, maka ayah atau ibu nyalah yang lebih berkompeten untuk memegang hak hadhanah tersebut, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, lagi pula Penggugat sebagai ayah meskipun pernah menjalani hukuman pidana penjara, namun saat ini telah bebas dan telah mempunyai pekerjaan tetap (kontraktor), sehingga mampu untuk membiayai dan memelihara serta memberikan pendidikan yang layak bagi kedua anak tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa sekurang-kurangnya lebih dari satu tahun terakhir ini anak pertama bernama ANAK I telah terbiasa hidup bersama ayahnya (Penggugat), sehingga apabila dipisahkan dari ayahnya dan harus hidup di keluarga ibu(Tergugat) sementara ibunya (Tergugat) berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka hal ini akan sangat mengganggu keadaan psikis (jiwa) dan kesejahteraan anak serta tidak akan memberikan kemaslahatan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, tetapi

justru menimbulkan kemudharatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak;

Terhadap anak yang kedua ANAK II, berdasarkan keterangan para saksi, telah terungkap bahwa anak tersebut telah diasuh atau telah terbiasa pula hidup bersama ayahnya (Penggugat) sejak anak tersebut berumur 2 bulan sampai sekarang berumur 9 tahun, maka demi kesejahteraan dan ketenangan jiwa anak tersebut, sudah selayaknya apabila anak kedua tersebut tetap dipertahankan diasuh oleh Penggugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang menjadi landasan hakim menjatuhkan putusan dengan amar

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi (Ayah) seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi (Ayah) sebagai hak hadhanah terhadap anak-anak dari perkawinan Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi.

C. Analisis Putusan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA. Mdn Dalam Perkara Hak Asuh Anak

1. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn

Ditinjau Dari Segi Hukum Formil

a. Struktur Putusan

Putusan Hakim harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani sebagai dokumen resmi. Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu, kepala putusan, identitas para pihak,

pertimbangan (konsideran) yang memuat tentang "duduknya perkara" dan "pertimbangan hukum", amar atau diktum putusan.⁶⁷

Struktur putusan tingkat pertama yaitu putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA. Mdn dan putusan tingkat banding yaitu putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt. G/2015/PTA.Mdn adalah sebagai berikut:

1) Kepala Putusan

Pada kepala putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding tersebut telah memiliki fungsi formal, karena pada putusan tingkat pertama dan tingkat banding telah mencantumkan kepala putusan pada bagian atas dengan memakai judul "PUTUSAN" selanjutnya mencantumkan nomor putusan. Kemudian disamping itu juga mencantumkan kalimat "Bismillahirrahmanirrahim" dan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mana telah sesuai dengan Pasal 57 Ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM diikuti dengan

⁶⁷ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 255.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2) Identitas Para Pihak

Pada putusan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn dan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, dengan nama, usia, agama, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat. Hal ini telah memenuhi struktur putusan yang kedua.

3) Pertimbangan (konsideren) yang memuat tentang “Duduknya Perkara” dan “Pertimbangan Hukum”

Dalam duduknya perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduknya perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugat, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti- bukti dan saksi-saksi, serta kesimpulan para pihak. Selanjutnya dalam duduknya perkara menggambarkan bagaimana Hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat/peristiwa yang diajukan para pihak. Terkait dengan hal tersebut, putusan tingkat pertama telah sesuai dengan hal- hal tersebut, sehingga tidak batal demi hukum. Namun dalam putusan tingkat banding agak sedikit berbeda dengan putusan tingkat pertama, karena pada putusan tingkat banding hanya mencantumkan amar putusan tingkat pertama,

yang berbunyi "Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn tanggal 06 Oktober 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1436 *Hijriyah* , yang amarnya berbunyi sebagai berikut: dst". Hal ini tidak menjadikan putusan tingkat banding batal demi hukum, karena Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak terpisahkan dengan Putusan Pengadilan Agama Medan. Selanjutnya dalam duduk perkara putusan tingkat banding juga dicantumkan bahwa pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn.

Mengenai pertimbangan hukum, yang mana hakim menggambarkan tentang bagaimana hakim menilai, dan mempertimbangkan secara rinci serta memuat dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1072/ Pdt.G/ 2015/ PA.Mdn dan Nomor 0139/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Mdn telah memenuhi pertimbangan hukum yang menjadi keberatan para-para pihak.

4) Amar atau Diktum Putusan

Amar atau diktum putusan merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh oleh hakim atas perkara yang di periksanya untuk mengakhiri sengketa.

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA. Mdn yang pada intinya membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1072/Pdt.G/2015/PA.Mdn dan mengabulkan gugatan dari Pembanding seluruhnya dengan menetapkan pemegang Hak Asuh anak pertama dan kedua dari Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat (Ayah).

Amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menjawab semua tuntutan yang diajukan Pembanding, dengan demikian amar tersebut sudah sesuai dengan struktur putusan yang sah demi hukum.

2. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn Ditinjau Dari Ketentuan Perundang-Undangan

Dalam putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn ketentuan perundang-undangan yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam memutuskan putusan tersebut, yakni:

- a. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketika orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan dan berkelakuan buruk sekali, maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak. Hal inilah yang

menjadi salah satu alasan hakim tidak memberikan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat (ibu), karena tergugat melakukan perbuatan tercela dan sedang menjalani hukuman pidana karena kasus narkoba.

- b. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam pasal tersebut setelah terjadinya perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.. Walaupun di dalam Kompilasi Pasal 156 ada yang mengatur urutan hak asuh anak setelah ibu, yakni hak asuh anak tersebut diberikan terlebih dahulu kepada nenek (ibunya ibu) dan setelah itu baru kepada ayah. Dalam hal ini hakim memandang apabila masih ada ayah atau ibu, maka ayah atau ibunya adalah yang lebih berkompeten untuk memegang hak asuh anak tersebut.
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

Selain peraturan perundang-undangan yang dijadikan hakim sebagai landasan dalam memutuskan suatu perkara yakni dengan alat bukti dan saksi- saksi. Yang mana alat bukti yang menyatakan bahwa benar penggugat (ibu) sedang menjalani hukuman pidana. Selanjutnya dengan keterangan saksi-saksi,

bahwa sekurang-kurangnya lebih dari satu tahun terakhir anak pertama telah terbiasa hidup dengan ayahnya (penggugat) sehingga jika dipisahkan dari ayahnya dan harus hidup dikeluarga ibu (tergugat) sementara tergugat sedang menjalani hukuman pidana, maka hal ini akan dapat mengganggu keadaan psikis (jiwa) dan kesejahteraan si anak serta tidak akan memberikan kemaslahatan terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak, tetapi justru menimbulkan kemudharatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Selanjutnya anak kedua berdasarkan keterangan saksi telah diasuh dan telah terbiasa hidup pula bersama ayahnya sejak berusia 2 bulan hingga sekarang (9 tahun), maka demi kesejahteraan dan ketenangan jiwa si anak tersebut, sudah selayaknya apabila anak kedua tersebut tetap dipertahankan diasuh penggugat.

3. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA. Mdn Ditinjau Dari Segi Kemaslahatan

Dalam KHI dan fiqh mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz apabila ibunya gugur dalam memegang hak asuh anak selanjutnya digantikan oleh ibunya ibu. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 0139/Pdt.G/2015/PA.Mdn hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz tersebut jatuh kepada ayahnya dan bukan pada ibunya ibu. Untuk menganalisis

lebih lanjut permasalahan tersebut akan di tinjau dari segi kemaslahatan.

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁶⁸

Menurut Najamuddin at-Thufi dalam pemikiran masalahahnya, baginya mutlak bahwa masalah merupakan dalil syara' yang terkuat. Masalah bukan merupakan dalil untuk mengistinbatkan hukum semata ketika tidak terdapat dalam nash dan ijma', melainkan juga harus di dahulukan atas nash dan ijma' ketika terjadi pertentangan antara keduanya yaitu takhsis atau bayan. Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bukan meninggalkan nash semata. Menurutnya, masalah bersumber dari sabda Nabi "*La darara wa la dirara*". Sabda ini merupakan landasan kokoh untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan hingga terhindar dari kemafsadatan. Itu sebabnya mengapa kemaslahatan lebih didahulukan.⁶⁹

Berkaitan dengan perkara ini, dalam konsep kemaslahatan at-Thufi yang lebih mengutamakan kemaslahatan agar terhindar dari kemafsadatan, pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama

⁶⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al- Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h.43.

⁶⁹ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam", *Et-Tijarie* 5,2 (2018): 52.

Medan dalam memutuskan perkaranya tidak hanya berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, melainkan juga dengan mengedepankan kemaslahatan si anak. Walaupun didalam Pasal 156 KHI setelah ibu adalah ibunya ibu yg lebih diutamakan daripada ayah dalam mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun dalam perkara ini, hakim memandang bahwa besar maslahatnya jika si anak tersebut diasuh oleh ayahnya daripada neneknya dari pihak ibu , karena kedua anak tersebut juga sudah terbiasa tinggal dan hidup bersama ayahnya. Jika hak asuh anak tersebut diberikan kepada keluarga ibunya (nenek) sedangkan si ibu sedang menjalani hukuman pidana, maka akan dapat mengganggu ketenangan jiwa si anak.

Seorang anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan dari orang tuanya, terutama anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mampu berdiri sendiri dan yang masih sangat memerlukan ampunan. Dalam masalah hadhanah terutama setelah terjadinya perceraian kepentingan anak sangatlah di utamakan, karena perceraian orang tua akan berdampak juga pada psikis si anak.⁷⁰ Jika dikaji dari segi KHI ataupun pendapat ulama fiqh setelah ibu memang ibunya ibu yang berhak dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz dan setelah itu baru ayah, namun tidak masalah jika ayah yang memegang hak asuh anak setelah ibu karena orang

⁷⁰Ahmad Riva'i, Hakim, Pengadilan Agama Medan Klas I A, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2020

tua itu pasti dekat dengan anaknya terutama ayah karena si anak tersebut adalah darah dagingnya.⁷¹

Keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu kepada Undang Undang serta Kompilasi Hukum Islam saja melainkan hakim mempertimbangkan juga demi kemaslahatan, terutama dalam masalah hadhanah kepentingan si anak harus didahulukan. Sama halnya dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan yang pertimbangan hukumnya tidak hanya berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, di samping itu Hakim juga memutuskan demi kemaslahatan si anak terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya sehingga Hakim memutuskan bahwa hak asuh kedua anak yang belum mumayyiz tersebut kepada ayahnya atau Penggugat Konvensi.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwasanya hak asuh anak tersebut jatuh kepada ayahnya. Jika suatu saat ibu dari anak tersebut telah bebas maka mereka dapat bermusyawarah dan meminta keterangan dari si anak apakah dia akan tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama dan kenyamanan bagi anak tersebut.

Menurut pendapat penulis dalam perkara ini, jika terjadinya perceraian antara pasangan suami dan istri mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz memanglah hak ibunya. Namun ketika

⁷¹M. Na'im, Hakim, Pengadilan Agama Medan Klas I A, Wawancara Pribadi, 19 Maret 2020

ibunya melakukan perbuatan tercela sehingga tidak dapat mengasuh anaknya, sebaiknya hak asuh anak tersebut selanjutnya diberikan kepada ayahnya. Karena seorang anak yang belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk terutama untuk dirinya ia masih butuh arahan, ampuan, serta kasih sayang terutama dari orangtuanya sendiri. Jika seorang anak tidak asuh oleh orangtuanya sendiri, yang ada anak tersebut jadi tidak dekat dengan orang tuanya dan kurangnya *respect* seorang anak terhadap orang tuanya. Dan jika di lingkungan masyarakat, ketika ia melihat orang disekitarnya memperoleh kasih sayang dari orangtunya yang ia tidak dapatkan dirumahnya, maka rasa iri akan muncul pada diri si anak sehingga dapat menggagu mental dan ketengan jiwa si anak tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah skripsi ini bab demi bab, maka penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Kronologi perkara dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn ialah berawal setelah terjadinya perceraian kedua anak penggugat dan tergugat yang belum mumayyiz tinggal bersama tergugat (ibu). Namun pada tahun 2013 tergugat melakukan perbuatan tercela sehingga ia harus menjalani hukuman pidana selama 6 tahun. Dikarenakan tergugat sedang menjalani hukuman pidana dan tidak dapat mengasuh kedua anak mereka, maka penggugat (ayah) melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Medan agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak. Dalam putusan Pengadilan Agama Medan, hakim memutuskan bahwa anak pertama jatuh kepada nenek (pihak ibu) dan anak kedua jatuh kepada ayah. Dikarenakan Penggugat tidak puas dengan hasil putusan PA Medan, penggugat mengajukan banding ke PTA Medan. Hasil putusan PTA Medan memberikan hak asuh kedua anak tersebut kepada penggugat (ayah).
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dengan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn ialah hakim

menimbang berdasarkan bukti bahwa tergugat (ibu) sedang menjani hukuman pidana dikarenakan kasus narkoba, sehingga tidak dapat melakukan pengasuhan terhadap anaknya. Selanjutnya hakim menimbang berdasarkan Undang-Undang bahwa ibu dan ayah memiliki hak yang sama dalam pengasuhan anak. Berdasarkan keterangan saksi bahwa anak pertama sudah terbiasa tinggal bersama ayahnya selama setahun belakangan, dan anak kedua sudah dirawat oleh ayahnya sejak usia 9 bulan. Demi kesejahteraan dan kepentingan bagi si anak, hakim memutuskan bahwa anak pertama dan anak kedua dari penggugat dan tergugat di asuh oleh penggugat (ayah)

3. Analisis Putusan Nomor 0139/Pdt.G/2015/PTA.Mdn ialah yang mana jika di analisis dari aspek hukum formil maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan telah sesuai berdasarkan struktur putusan. Analisis perundang undangan yang dijadikan hakim sebagai landasaan dalam memutuskan putusan, yakni berdasarkan Pasal 41 ayat 1 yang menyatakan bahwa setelah perceraian ayah dan ibu memiliki hak yang sama dalam pemeliharaan anak, Pasal 49 ayat 1 yang menyatakan ketika orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anak dan bekelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak , dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyataka bahwa anak berhak mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.

Analisis dari segi kemaslahatan, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan Undang-undang, melainkan juga demi kepentingan si anak, yang mana lebih baik dan besar maslahatnya jika kedua anak tersebut diasuh oleh ayahnya daripada neneknya dari pihak ibu, dan karena anak tersebut juga sudah biasa tinggal bersama ayahnya dan diasuh sebaik mungkin oleh ayahnya sehingga hakim memutuskan hak asuh kedua anak yang belum mumayyiz tersebut diberikan kepada ayahnya.

B. Saran

1. Apabila terjadi perceraian, maka anaklah pihak yang paling dirugikan, sehingga perlu berpikir panjang lagi untuk mengambil keputusan perceraian karena banyak dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut.
2. Apabila masalah hadhanah tersebut masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka sebaiknya tidak perlu menempuh jalur pengadilan. Dan apabila memang harus menempuh jalur pengadilan maka hendaklah hakim memberi keputusan yang adil dan bijaksana
3. Setelah terjadinya perceraian kepentingan si anak harus lebih diutamakan, agar tidak berpengaruh terhadap ketenangan jiwa serta mental si anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Al-Rahman, Abd. *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*. Jakarta: Aneka Cipta, 1996.

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji, 2016.

Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bunyamin, Mahmuddin dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.

Dahwadin dkk. *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.

Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Tanjung Mas Inti.

Faisal, Sanafiah. *Penelitian Kualitatif: Dasar dan Aplikasinya*. Malang: YA3, 1990.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hamidy, Mu'ammal. *Perkawinan dan Persoalannya*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.

Harahap, Pangeran. *Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media, 2014.

- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al- Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Koentjoningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia, 1997.
- Kurniawati, Vivi. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Peradilan Agama di Indonesia*. Medan: Perdana Publishing, 2010.
- Presiden RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Razak A. dan Rais Lathief. *Terejemahhan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1988.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers, 1986.
- Sutikno, M. Sobry. *Belajar dan Pembelajaran*. Lombok: Holistica, 2013.

Syahputra, Akmaluddin. *Perwalian Anak dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

B. Jurnal

Amri, Miftaakhul. "Konsep Maslahat dalam Penetapan Hukum Islam". *Et-Tijarie*. 5,2. 2018.

Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum*. 10,1. Juni 2010.

Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum". *Jurnal Dinamika Hukum*. 11,1. September 2011.

Prayogo, R. Tony. "Penerapan Asas Kepastian Hukum". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13,02. Juni 2016.

C. Wawancara

Ahmad Riva'i. Hakim. Pengadilan Agama Medan Klas I A. Wawancara Pribadi. 19 Maret 2020.

M. Na'im. Hakim. Pengadilan Agama Medan Klas I A. Wawancara Pribadi.
19 Maret 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Hapizah Alawiyah, biasa dipanggil “Pije”. Lahir di Kabanjahe, pada tanggal 30 Juni 1999. Puteri kedua dari pasangan suami isteri Alm. Sahnun Rangkuti dan Dra. Hj. Rosmanidar. Penulis merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara, yang mana nama-nama saudara penulis tersebut yaitu: Amaliyah Rahmah (Kakak), dan M.Faiz Azmi (Adek).

Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Parbangunan Nomor 147890 Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2010, tingkat SLTP di Madrasah Tsanawiyah Negeri Sibolga, Kota Sibolga pada tahun 2013, dan tingkat SMA di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Medan pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum jurusan Al – Ahwal As – Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2016.